



**Mahkamah Agung
Republik Indonesia**

**REVISI
PERJANJIAN
KINERJA
2020**

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **A.S. PUDJOHARSOYO**

Jabatan : **SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Juni 2020
SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

A.S. PUDJOHARSOYO

**REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
MAHKAMAH AGUNG RI**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	100%
		b. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	2%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali)	50%
		d. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	25%
		e. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan;	80%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	20%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	25%
3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	30%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%
		c. Persentase perkara permohonan (<i>voluntair</i>) identitas hukum	100%
		d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	75%
5	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan peradilan	Persentase SDM teknis yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial (Umum, Agama dan Miltun)	100%
6	Meningkatnya hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang Berkualitas	a. Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan Pengadilan	4
		b. Persentase Sumber Daya Manusia Peradilan yang meningkat kompetensi setelah mengikuti diklat	20,31%

7	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	a.	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti;	85%
		b.	Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan;	85%
8	Meningkatnya Transparasi Pengelolaan SDM, Keuangan, dan Aset	a.	Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima	85%
		b.	Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Pnilaian Prestasi Kerja)	100%

Sasaran strategis tersebut akan dicapai melalui program, dengan perincian sebagai berikut:

NO	PROGRAM	ANGGARAN	
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Rp	8.723.644.945.000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Rp	1.226.107.296.000
3	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung RI	Rp	40.273.336.000
4	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Mahkamah Agung	Rp	173.471.039.000
5	Program Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung	Rp	172.033.639.000
6	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp	148.038.623.000
7	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp	85.807.448.000
8	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)	Rp	28.551.651.000
JUMLAH		Rp	10.597.927.977.000

Jakarta, Juni 2020
SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA


A.S. PUDJOHARSOYO